

Tulisan ini berisi mengenai bagaimana peran media lokal dalam menyajikan berita pada pemilihan umum Presiden 2014 lalu. Fokus dari penelitian ini adalah SKH Kedaulatan Rakyat yang merupakan salah satu media lokal yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Yogyakarta dan massif dalam menyajikan pemberitaan Pilpres. SKH Kedaulatan Rakyat disebut-sebut sebagai Koran merah yang berarti koran yang merepresentasikan salah satu partai yang maju dalam Pilpres 2014 lalu, yakni PDIP. Posisi Idham Samawi pemilik modal SKH Kedaulatan Rakyat dan Ketua Tim Sukses DIY Jokowi-JK juga merupakan salah satu alasan SKH Kedaulatan Rakyat disebut sebagai Koran merah. Disebut sebagai Koran merah, membuat SKH Kedaulatan Rakyat menjadi pilihan dalam fokus penelitian ini dan menarik untuk ditelusuri bagaimana SKH Kedaulatan Rakyat melakukan konstruksi pemberitaan terhadap kedua pasangan Capres-Cawapres Pilpres 2014 lalu.

Jawaban dari pertanyaan pokok tersebut akan dikerangkai dengan konsep analisa framing model Robert Entman yang menganalisa suatu pemberitaan menggunakan empat elemen yakni *frame*, *causal interpretation*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Berita yang telah dipilih untuk merepresentasikan konstruksi yang dilakukan oleh SKH Kedaulatan Rakyat terhadap kedua pasangan capres-cawapres akan dianalisa berdasarkan keempat elemen analisa framing model Robert Entman tersebut.

SKH Kedaulatan Rakyat melakukan konstruksi yang berbeda terhadap kedua pasangan capres-cawapres, baik dari segi sudut pandang pemberitaan, pilihan isu yang dipilih, perbandingan jumlah berita kedua pasangan, labelling positif dan negatif serta perbedaan cara penyajian berita terhadap kedua pasangan.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, SKH Kedaulatan Rakyat tidak bisa disebut sebagai ruang publik yang ideal karena mendahulukan kepentingan kekuasaan atau politik (*power interest*) dan kepentingan ekonomi (*economic interest*) daripada mendahulukan kepentingan publik. Bukti dari SKH Kedaulatan Rakyat mendahulukan kepentingan kekuasaan atau politik adalah tidak adanya keseimbangan dalam pemberitaan kedua pasangan capres-cawapres. Sedangkan bukti dari SKH Kedaulatan Rakyat mendahulukan kepentingan ekonomi dapat dilihat pada iklan dukungan politik Jokowi-JK yang setiap harinya mewarnai halaman utama SKH Kedaulatan Rakyat. Media massa yang seharusnya berperan sebagai sumber informasi yang seimbang dalam pemilu, justru digunakan sebagai alat kepentingan dan pembentuk *image* terhadap kedua pasangan capres-cawapres Pilpres 2014.

Kata kunci: konstruksionisme, analisa framing, ruang publik, konstruksi realitas

This paper explains about the role of local media in presenting the news of the Presidential Election 2014. The focus of this paper is SKH Kedaulatan Rakyat. SKH Kedaulatan Rakyat is one of the most popular and widely consumed by the people of Yogyakarta. SKH Kedaulatan Rakyat is one of many newspaper that presenting news about Presidential Election 2014. SKH Kedaulatan Rakyat is sometimes called 'koran merah' or 'red newspaper', because red is colour of PDIP. One of the owners, Idham Samawi, He is also PDIP political campaign staff manager regional Yogyakarta of PDIP party. Idham's position as the owner of local newspaper and manager staff of PDIP political campaign are the reasons why SKH Kedaulatan Rakyat called 'red newspaper' by the public. Idham's position makes SKH Kedaulatan Rakyat interesting to explore. This paper will analyze about how SKH Kedaulatan Rakyat framing presidential Election 2014. Is Idham's position as owner and party affiliate affecting how's the news being framed or not?

To answer those question, the newspaper will be analyze based on The four elements of Robert Entman's concept; frame, causal interpretation, make moral judgement, and treatment recommendation.

SKH Kedaulatan Rakyat frame both party candidates differently. We can see from news angle, issue, article proportion, positive and negative labeling, as well as different ways to presenting news about the both parties.

Based on the analysis, SKH Kedaulatan Rakyat can not be called as a ideal public space because putting ahead power interest and economy interest instead of public interest. We can see that from how the news about both party candidates being framed differently. The media are supposed to serve as a neutral source of information to provide about election news, but being used as political interest during presidential election.

**Keywords:** constructionism, framing analysis, public space, construction of reality